



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2080/Pdt.G/2022/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “Cerai Talak” antara:

TERMOHON, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN KARAWANG, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN KARAWANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang dibuat olehnya sendiri tertanggal 08 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan nomor 2080/Pdt.G/2022/PA.Krw., tanggal 08 Juni 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 01 November 2015, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Karawang, dengan bukti buku kutipan akta nikah nomor 0648/005/XI/2015, tanggal 02 November 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orangtua Pemohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan alamat Pemohon di atas. Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon seringkali mempermasalahkan dan tidak menerima terkait nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga semaksimal mungkin kemampuan Pemohon, namun tetap saja Termohon sering mempermasalahkannya, serta Termohon juga sering meminjam dan berhutang kepada orang lain, tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon selaku suami, sehingga hal tersebut membuat Pemohon kecewa terhadap Termohon;

4. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan September 2021, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi kerumah saudaranya Termohon yang sesuai dengan alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon yang sesuai dengan alamat Pemohon di atas. Sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang *sakinah mawaddah*, dan *rahmah* tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat *maslahat* adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

putusan nomor 2080/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati kepada Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik berupa surat maupun saksi-saksi;

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh pihak Pemohon di persidangan terdiri atas satu lembar, yaitu fotokopi kutipan akta nikah 0648/005/XI/2015, tanggal 02 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Karawang (bukti P.1), yang bukti tersebut telah dicocokkan dengan dengan aslinya, dan telah telah sesuai;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon di persidangan sebanyak dua orang, yaitu:

SAKSI 1 PEMOHON, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX, tempat kediaman di
KABUPATEN KARAWANG;

Bahwa saksi mengaku sebagai XXXXXX Pemohon, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi;

putusan nomor 2080/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAN SETERUSNYA;
- bahwa pemohon dan termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2 PEMOHON, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di
KABUPATEN KARAWANG;

Bahwa saksi mengaku sebagai XXXXXXXX Pemohon, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi;
- DAN SETERUSNYA;
- bahwa pemohon dan termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa pihak Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati kepada Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini Termohon tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Pengadilan berpendapat perkara *a quo* harus diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* harus diputus dengan verstek, namun untuk kepentingan hukum, Pengadilan perlu memeriksa buktii-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon yang lainnya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan akta otentik (vide pasal 165 HIR *jo.* pasal 1868-1870 KUHPerdara), maka Pengadilan berpendapat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai

putusan nomor 2080/ptd.g/2022/pa.krw. | halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 November 2015, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon atau pun Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon, ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, kemudian keterangannya berdasarkan pendengaran atau penglihatan sendiri, maka saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan keterangannya, sesuai ketentuan pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dikutip dalam duduk perkara putusan ini, yang ternyata keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian, dan telah pula mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat apa-apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun atau tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang menurut dalil Pemohon pada bulan Agustus tahun 2021, yang penyebabnya adalah masalah ekonomi dan suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga akibat dari perselisihan tersebut, maka puncaknya pada bulan September tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah atau pisah tempat tinggal, yang sampai saat ini kurang lebih

putusan nomor 2080/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam sebuah keluarga (rumah tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan menurut hukum, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dalam persidangan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan thalak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari ini, *Rabu, tanggal 22 Juni 2022 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *22 Dzulqad'ah 1443 Hijriyah*, oleh Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. dan Drs. H. Syarifudin, M.H., sebagai Anggota-Anggota, dan diucapkan pada

putusan nomor 2080/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota, dan Asnali, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.

Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly

Anggota II,

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Panitera Pengganti,

Asnali, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	340.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 460.000,-

Terbilang: empat ratus enam puluh ribu rupiah.

putusan nomor 2080/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)